

**NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA MODUL**

**PPKn KELAS X**

# PENYUSUN

**ALI IMRON**

# DAFTAR ISI

[PENYUSUN 2](#_bookmark0)

[DAFTAR ISI 3](#_bookmark1)

[GLOSARIUM 4](#_bookmark2)

[PETA KONSEP 5](#_bookmark3)

[PENDAHULUAN 6](#_bookmark4)

1. [Identitas Modul 6](#_bookmark5)
2. [Kompetensi Dasar 6](#_bookmark6)
3. [Deskripsi Singkat Materi 6](#_bookmark7)
4. [Petunjuk Penggunaan Modul 6](#_bookmark8)
5. [Materi Pembelajaran 7](#_bookmark9)

[KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 8](#_bookmark10)

[Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia 8](#_bookmark11)

1. [Tujuan Pembelajaran 8](#_bookmark12)
2. [Uraian Materi 8](#_bookmark13)
3. [Rangkuman 14](#_bookmark14)
4. [Latihan Soal 15](#_bookmark15)
5. [Penilaian Diri 18](#_bookmark16)

[KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 19](#_bookmark17)

[Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian 19](#_bookmark18)

1. [Tujuan Pembelajaran 19](#_bookmark19)
2. [Uraian Materi 19](#_bookmark20)
3. [Rangkuman 24](#_bookmark21)
4. [Penugasan Mandiri 25](#_bookmark22)
5. [Latihan Soal 26](#_bookmark23)
6. [Penilaian Diri 29](#_bookmark24)

[EVALUASI 30](#_bookmark25)

[DAFTAR PUSTAKA 37](#_bookmark26)

# GLOSARIUM

Kekuasaan kemampuan, kesanggupan sebagai potensi yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk memerintah, namun harus terdapat daerah yang mewadahi orang- orang yang diperintahnya.

Kekuasaan Horizontal kemampuan dalam menguasai padahal dengan

kedudukan yang sama, dalam hal ini adanya sebuah kesepakatan dimana wilayah yang dikuasainya berdasarkan perbedaan jenis perintah.

Kekuasaan Vertikal kemampuan menguasai dengan kedudukan yang berbeda

dan bersifat hirarkhis serta tidak dapat ditolak karena kedudukannya lebih tinggi dan sebaliknya.

Nilai-nilai Pancasila sifat-sifat yang penting dan berguna dari Pancasila untuk

dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Nomenklatur untuk menamai bidang tertentu disesuaikan dengan fungsi dan keberadaannya dalam suatu Lembaga negara.

Pembagian kekuasaan terdapat bagian tertentu dari kemampuannya

memerintah yang dapat difungsikan dalam memerintah di wilayah dan kemampuan bidang lainnya.

Pemerintahan sistem kekuasaan yang berada pada wilayah tertentu untuk melaksanakan kemampuanya dalam memberikan arahan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pemisahan Kekuasaan kemampuan dan wilayah yang berbeda dalam

melaksanakan kekuasaannya, tidak dapat memengaruhi dan melampaui kekuasaan yang lain.

Penyelenggaraan proses melaksanakan dan mewujudkan tujuan yang

ditulis atau disepakati agar menjadi kenyataan.

# PETA KONSEP

Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia



Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

# PENDAHULUAN

# Identitas Modul

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas : X

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit (2 Pertemuan)

Judul Modul : Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

# Kompetensi Dasar

3. 1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

* 1. Menyajihasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara Negara

# Deskripsi Singkat Materi

Pada modul ini kalian diajak untuk memahami konsep, fakta dan prosedur materi mengenai Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia, Kedudukan dan Fungsi Kementrian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah-non Kementrian, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan pemerintah.

Untuk mempermudah dan memahami Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara maka modul ini akan mengajak kalian untuk membuat pemetaan konsep kekuasaan dalam *mind mapping*.

# Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mendalami materi dalam modul ini, hal berikut harus diikuti dengan seksama:

* 1. Baca dan pahami materi yang disampaikan dalam modul ini
  2. Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada modul ini baik bekerja sendiri maupun bersama teman lainnya.
  3. Kerjakan dengan cara langsung mengisikan pada bagian yang telah disediakan.
  4. Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo berlatih, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan- permasalahan dalam latihan, kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar kalian dapat lanjut belajar ke kegiatan pembelajaran berikutnya
  5. Di bagian akhir terdapat Evaluasi untuk mengukur keberhasilan juga pemahaman kalian tentang KD ini.

# Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi **3** kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama : Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Kedua : Kedudukan dan Fungsi Kementrian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah-non Kementrian

# KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

# Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Selamat, kalian sudah memasuki jenjang SMA. Pada modul ini kita akan mencoba memahami lebih jauh tentang sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia, dengan cara memahami terlebih dahulu tentang hakikat sistem pemerintahan yang mendukung pembangunan bangsa dan Negara. Lebih jauhnya kita akan mencoba menggambarkan sebuah sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia.

# Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kemudian mampu mengidentifikasi sistem pemerintahan Republik Indonesia. Setelah itu, kalian berupaya menjelaskan pada temanmu hasil telaah isi analisis tentang Nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia

# Uraian Materi

Kalian sering mendengar istilah pemerintah, banyak sekali pemberitaan yang menayangkan tentang kebijakan dan orang-orang yang disebut pemegang jabatan. Namun kadang luput dari pemahaman kita, siapa dan apa sebenarnya pengertian pemerintah. Oleh sebab itu, mari kita ulas. Seorang pakar politik, M. Solly Lubis membuat batasan pengertian Pemerintah yaitu seorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negerinya. Bahkan ia menyatakan bahwa suatu masyarakat yang anarchitis (a- artinya tidak, *archy* artinya pemerintahan) bukanlah negara.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok orang itu hanya mengikuti hukum yang berlaku di negerinya, barulah dapat disebut Pemerintah, dan jika masyarakatnya tidak patuh pada pemerintah dan aturannya, maka tidak dapat disebut negara. Indonesia menyusun suatu bentuk negara dan sistem pemerintahannya berdasarkan UUD NRI tahun 1945.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini menegaskan bahwa negara yang didirikan adalah negara kesatuan bukan negara federal. Negara kesatuan mengatasi semua paham individu maupun paham golongan. Salah satu ciri negara kesatuan adalah kedaulatan negara tidak terbagi-bagi. Walaupun pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada pemerintah daerah, tetapi pada akhir kekuasaan tertinggi tetap berada ditangan pemerintah pusat. Bagi negara kesatuan Republik Indonesia pemerintah daerah (provinsi) merupakan bagian tidak terpisah serta tidak bersifat negara dalam negara.

Bentuk Pemerintahan yang diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Republik, yaitu bentuk pemerintahan untuk membedakan dengan Monarki (Kerajaan). Bentuk pemerintahan ini dipimpin oleh seorang Presiden. Presiden memegang kekuasaan dalam negara tidak secara turun menurun, melainkan melalui sebuah mekanisme demokrasi yang berlangsung dan diakui dalam negara tersebut.

Sistem pemerintahan suatu bangsa tergantung pada sistem politik yang dianut Negara tersebut. Sedangkan sistem politik suatu bangsa ditentukan oleh ideologi

yang dianut oleh Negara tersebut. Indonesia sudah menentukan ideologinya berdasarkan Pancasila, maka sistem pemerintahan Indonesia melandaskan diri pada sila Pancasila terutama “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memilih pemerintahan Demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pelajarilah teks Pancasila berikut ini,



Sumber : http:/ /nationalgeographic.co.id

### P A N C A S I L A

* 1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
  2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
  3. PERSATUAN INDONESIA
  4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH KHIDMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
  5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Hafalkan dan maknai nilai-nilai prinsip pada Pancasila, kita akan memahami mengapa Indonesia memilih sistem Demokrasi berdasarkan Pancasila. Jika diuraikan lebih luas, maka demokrasi Pancasila mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem demokrasi lainnya.

Kelebihan demokrasi Pancasila dilihat dari prinsip-prinsip pokoknya sebagai berikut:

1. Mengakui persamaan kedudukan bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
3. Menjamin pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Mewujudkan rasa keadilan sosial
5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

Prinsip-prinsip di atas merupakan karakteristik dari sistem politik Indonesia. Ketujuh nilai tersebut dapat menuntun penguasa ataupun rakyat Indonesia untuk senantiasa menjadi lebih baik dalam kehidupan kenegaraan. Prinsip-prinsip di atas juga berperan sebagai identitas diri bangsa Indonesia yang dapat dibanggakan.

Ada empat ciri khas dari sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial lainnya, yaitu:

1. daya jangkaunya *universal,* meliputi semua anggota masyarakat
2. adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik
3. hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah
4. keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar.

Nah… nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang berasal dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Untuk lebih memahami hal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam sistem politik di Indonesia, berikut kita sampaikan tentang macam-macam kekuasaan negara dan pembagian kekuasaan.

### Macam-Macam Kekuasaan Negara

Untuk memahami lebih jauh macam-macam kekuasaan, ada baiknya kita kutip temuan dari ahli politik yang menjelaskan macam-macam kekuasaan dengan istilah dan pengertiannya. Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273) bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut.

* 1. **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang- undang.
  2. **Kekuasaan eksekutif**, yaitu **kekuasaan** untuk melaksanakan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang.
  3. **Kekuasaan federatif**, yaitu **kekuasaan** untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Tokoh lainnya yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273), ia menyatakan sebagai berikut:

1. **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
2. **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
3. **Kekuasaan yudikatif**, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang.

Montesquieu berpendapat bahwa Kekuasaan federatif dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan **Trias Politika**.

### Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Jika kita amati secara seksama mengapa perlu adanya konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan, ternyata bertujuan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. sehingga, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja.

Istilah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan pembagian kekuasaan (*divisions of power*) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Kusnardi dan Ibrahim (1983:140) menyatakan bahwa Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerja sama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya

masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.

Sedangkan dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif ), dan dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Adapun mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

### Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga- lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif ) menjadi enam kekuasaan negara.

1. **Kekuasaan konstitutif**, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”
2. **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang- undang dan penyelenggraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”
3. **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang- undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”
4. **Kekuasaan yudikatif** atau disebut **kekuasaan kehakiman** yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
5. **Kekuasaan eksaminatif/inspektif**, yaitu kekuasaan yang berhubungandenganpenyelenggaraanpemeriksaanataspengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat
   1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

“untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

1. **Kekuasaan moneter**, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang- undang.”

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/ kota.

### Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

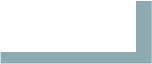
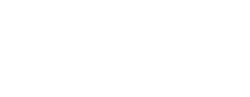
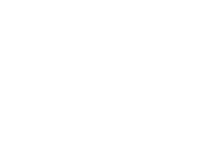
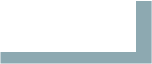
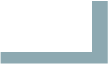
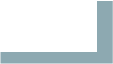
Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.



**Ayo berlatih!**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DPRD TK.** |  | **GUBERNUR** |
|  |

Bagan Struktur Pemerintahan Indonesia (Sumber : <http://schematicskehidupan.blogspot.com/2011/01/struktur-sosial-indonesia-rev>)



**KABINET**

**LEMBAGA NON DEPARTEMEN**

**DUKUH setingkat RW**

**DUKUH**

**RT**

**RW**

**RT**

**KADES**

**LURAH**

**CAMAT**

**BUPATI**

**WALI KOTA**

**DPRD TK.**

**LEMBAGA KEHAKIMAN**

**/ PERADILAN**

**MA**

**DPD**

**PRESIDEN/WA**

**DPR**

**MPR**

**BPK**

**YUDIKATIF**

**LEGISLATIF**

**EKSEKUTIF**

**[ Jika suatu penduduk yang terdiri dari banyak RW ]**

**Jika suatu penduduk yang terdiri dari 1 RW**

**UUD 1945**

Dalam bagan tersebut, kalian diminta untuk menuliskan nama-nama orang yang menjabat kekuasaan (cukup seorang saja sesuai yang kalian ketahui), dengan rubrik sebagai berikut:

1. Tiap nama yang disebut beri nilai = 1
2. Jika ada yang tidak diisi karena Namanya tidak tahu diberi nilai= -1
3. Jika tidak diisi karena tidak ada kekuasaan tersebut di wilayahmu beri nilai=0 Nilai yang saya dapat adalah

Setelah mengisi bagan tersebut dan pengertian pembagian kekuasaan, saya memahami bahwa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan adalah

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Dari skala nilai 1-100 nilai saya adalah

# Rangkuman

### Macam-Macam Kekuasaan Negara

* 1. Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273) bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut.
     1. **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang- undang.
     2. **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang.
     3. **Kekuasaan federatif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.
  2. Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273), ia menyatakan sebagai berikut:
     1. **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
     2. **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang.
     3. **Kekuasaan yudikatif**, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang.

### Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

### Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu

1. **Kekuasaan konstitutif**, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang- undang dan penyelenggraan pemerintahan negara.
3. **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang- undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat
4. **Kekuasaan yudikatif** atau disebut **kekuasaan kehakiman** yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
5. **Kekuasaan eksaminatif / inspektif**, yaitu kekuasaan yang berhubungandenganpenyelenggaraanpemeriksaanataspengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
6. **Kekuasaan moneter**, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.

### Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal

# Penilaian Diri

Isilah rubrik sikap dengan Setuju, Tidak setuju, dan tidak tahu sesuai dengan yang dirasakan dari pertanyaan perilaku, dan berikan alasan atas jawaban sikap tersebut!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perilaku** | **Sikap saya** | **Alasan** |
| 1. | Saya sudah memahami Pembagian kekuasaan antara pusat dan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Indonesia |  |  |
| 2. | Saya mulai menyadari dalam menjalankan  kekuasaan, pemerintah harus mengtahui wewenang dan kewajibannya |  |  |
| 3. | Perilaku anarchistis tidak menyiratkan sebuah kedaulatan berada di tangan rakyat |  |  |
| 4. | Menyalurkan pendapat melalui lembaga Perwakilan rakyat, infrastruktur dan media massa |  |  |
| 5. | Mendukung program pemerintah karena saya memahami kekuasaan yang  dijalankannya untuk kepentingan rakyat |  |  |

# KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

# Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

## Sekarang kita menuju pembelajaran kedua, semoga kalian tetap bersemangat mempelajari sistem kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Tetap memiliki motivasi untuk mencintai negeri ini …

# Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian dapat menganalisis Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Dilanjutkan dengan kegiatan mengidentifikas tugas dan wewenang Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Sehingga kalian mampu menjelaskan pada temanmu hasil telaah isi analisis tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian negara Republik Indonesia

# Uraian Materi

### Kementerian Negara Republik Indonesia

Sebelum kita mengulas tentang kementerian, ada baiknya kita simak terlebih dahulu sebuah kalimat motivasi yang disampaikan oleh Douglas K. Stevenson (1987) yang mengutarakan tentang *American life* (kehidupan orang Amerika), yakni: “Kita yakin bahwa pemerintahan kita adalah lemah, bodoh, suka memaksa, tidak jujur, dan tidak efisien. Meskipun demikian, pada saat yang sama, kita sangat yakin bahwa sistem kita merupakan sistem pemerintahan terbaik di dunia, dan kita ingin memberlakukannya pada setiap negara.”

Kalimat yang diutarakan oleh Douglas memberikan pelajaran kepada kita bahwa apapun yang terjadi pada pemerintahan kita, kita harus tetap memotivasi diri untuk menjadikannya sebagai sistem terbaik dan mampu mengajarkannya pada negara lain. Intinya, tetaplah bangga menjadi warga negara Indonesia.

Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, dimana dalam sistem ini presidensial adalah kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, yang kewenangannya menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara

Sebagai kepala negara, presiden Republik Indonesia berwenang :

* 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10)
  2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1)
  3. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2)
  4. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
  5. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2)
  6. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3)
  7. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1)
  8. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2)
  9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15)

1. Kewenangan Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan

Sebagai kepala pemerintahan, presiden Republik Indonesia berwenang :

* 1. Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1)
  2. Mengajukan Rancangan Undang Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1)
  3. Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 2)
  4. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16)
  5. Mengangkat dan memberhentikan menteri- menteri (Pasal 17 ayat 2)
  6. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4)
  7. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat 1)
  8. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2)
  9. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat 1)
  10. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR (Pasal 24A ayat 3)
  11. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B ayat 3)
  12. Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan Sembilan orang hakim konstitusi (Pasal 24 C ayat 3)

Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih berpasangan melalui pemilihan umum, serta membentuk kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya.

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

* + 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
    2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
    3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
    4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian Negara diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/ menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu:

1. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
2. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas

pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinnkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Dalam Pasal 17 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing- masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

### Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu:

* + 1. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
       1. Kementerian Dalam Negeri
       2. Kementerian Luar Negeri
       3. Kementerian Pertahanan
    2. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
       1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
       2. Kementerian Keuangan
       3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
       4. Kementerian Perindustrian
       5. Kementerian Perdagangan
       6. Kementerian Pertanian
       7. Kementerian Kehutanan
       8. Kementerian Perhubungan
       9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
       10. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
       11. Kementerian Pekerjaan Umum
       12. Kementerian Kesehatan
       13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
       14. Kementerian Sosial
       15. Kementerian Agama
       16. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
       17. Kementerian Komunikasi dan Informatika
    3. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
       1. Kementerian Sekretariat Negara
       2. Kementerian Riset dan Teknologi
       3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
       4. Kementerian Lingkungan Hidup
       5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
       6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
       7. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
       8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
       9. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
       10. Kementerian Perumahan Rakyat
       11. Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

### Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non- Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait.

Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non- Departemen. Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Badan Informasi Geospasial (BIG);
3. Badan Intelijen Negara (BIN);
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);
9. Badan Narkotika Nasional (BNN);
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
13. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan;
14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
16. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup;
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),di bawah koordinas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
19. Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri;
20. Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
21. Badan SAR Nasional (Basarnas);
22. Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
23. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
24. Badan Urusan Logistik (Bulog), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
25. Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
26. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
27. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
29. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
30. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan;
31. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

**Ayo Berlatih !**

**Buatlah peta konsep tentang penggolongan kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga Non-Kementerian**

**Kementerian**

Urusan Pemerintahan tertentu

**Berdasarkan peta konsep yang telah dibuat, jika skor berada pada nilai 1-100, nilai yang pantas kalian dapat adalah**

Koordinator

Nomenklatur

# Rangkuman

### Kementerian Negara Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih berpasangan melalui pemilihan umum, serta membentuk kementerian. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

### Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu:

* 1. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas: Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan
  2. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan
  3. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah

### Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

# Penugasan Mandiri

**Analisis Sebuah Kasus Berikut ini !**

***SANG PEMBERI CONTOH***

*Muhammad Syafrie*

*Siang ini sinar matahari Banda Aceh terasa lebih panas, seolah ingin menandingi Mekkah yang terkenal bertemperatur tinggi. Hal tersebut wajar adanya mengingat Bnda Aceh tak jauh dari pesisir dan kota ini lazim disebut sebagai Serambi Mekkah. Boleh jadi pemberian nama julukan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan syariat islam tetapi juga menyangkut teriknya sorot mentari Aceh yang terkenal sangar.*

*Saya yang berada di gedung perkantoran dapat terbebas dari gerah karena semua ruang di gedung ini ber-AC. Meski demikian, duduk berhadapan dengan pimpinan kantor membuat saya kikuk dan merasa kegerahan. Tentu saja itu sebuah perasaan yang wajar dan lazim dirasakan oleh para bawahan.*

*Demikianlah, kepala kantor tempatku bekerja memiliki kegemaran memanggil pegawai level pelaksana ke ruangannya. Beliau menanyakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka dan memastikan semua tanggung jawab dilaksanakan dengan baik. Sepertinya reformasi birokrasi di DJP* (Direktorat Jenderal Pajak, penulis) *tidak hanya memangkas birokrasi pelayanan wajib pajak, tetapi juga memangkas perjenjangan eselon dan jabatan di kantor ini.*

*“Bagaimana, apakah laporan ini sudah benar?”*

*Sambil bertanya beliau tetap mengarahkan matanya ke atas lembaran kertas laporan yang saya serahkan. Seharusnya saya bisa segera menjawab pertanyaannya. Bukankan semua data ttelah diverifikasi sebelumnya. Tidakkah itu berarti apa yang tertulis dalam laporan adalah benar dan valid? Sebetulnya sudah beberapa kali saya menemui beliau, namun hal tersebut tidak otomatis membuat saya terbiasa dengan aura ketidaknyamanan ini.*

*“Bagaimana?” suaranya kembali memecah kekakuan.*

*“sudah Pak,” suara saya mungkin terdengar tidak pasti dan tidak cukup meyakinkan.*

*Tidak ada jawaban. Suara saya menguap keluar. Dari ujung mata saya masih bisa melihat beliau terus meneliti lembaran-lembaran kertas rekapan daftar absensi. Daftar itulah yang kemudian akan menjadi dasar-dasar untuk membuat pemotongan tunjangan bagi seluruh pegawai apabila yang bersangkutan pernah tidak hadir, datang terlambat, atau pulang sebelum waktunya.*

*Sambil menanti kalimat-kalimat selanjutnya yang akan dilontarkannya, saya berpikir apakah beliau tersinggung karena namanya masuk dalam daftar pegawai yang datang terlambat? Apakah perlu saya buatkan fasilitas yang melindungi mukanya dari malu karena pernah datang terlambat? Haruskah data yang ada dimanipulasi untuk kenyamanannya?*

*“Benar saya pernah datang terlambat?”*

*“Betul Pak. Mengenai tanggal berapa tepatnya saya tidak cek di komputer, Pak.” Suara saya*

*parau karena tenggorokan saya terasa bagai tercekik.*

*“Kalau memang benar, tidak apa-apa,” begitu katanya dan saya masih coba terus mencerna kadar ketulusan jawabannya. Apakah kalimatnya bermakna konotatif dengan makna tersembunyi ataukah memang bermakna leksikal, persis seperti yang telah saya dengar? Saya merasa bersalah dan kikuk berada di hadapannya. Saya merasa jawaban yang saya berikan meninggalkan kesan tidak baik sebagai bawahan. Haruskah saya meralatnya?.*

*Saya masih diam, keheningan memadat dalam ruangan. Masih dengan penuh keraguan saya menimbang-nimbang sekiranya kata-kata semacam apa yang bisa saya utarakan untuk menawarkan fasilitas atau keinginan untuk keterlambatan yang pernah beliau lakukan.*

*“kau tahu, mungkin saya ini satu-satunya kakanwil yang tunjangannya kena potong?”*

*Saya masih terdiam sambil menganggukan kepala perlahan-lahan. Lalu beliau tersenyum. Di antara rasa salah, takut, kagum, dan bangga, saya membalas senyumannya.*

*Satu senyuman sederhana yang beliau tunjukkan merupakan bukti yang membuat saya tersadar. Darinya saya bisa meraba komitmen seorang atasan yang menumbuhkan optimisme bahwa institusi yang dianggap terkorup sekalipun bisa berubah, membaik, dan itu dimulai dengan hal kecil,*

*Saya merasa lega bukan karena akhirnya tidak ada vonis bersalah untuk saya dari sang kepala. Saya bahagia karena menjadi saksi atas keberanian dan kejujuran yang masih ada di institusi ini.*

*Ada tunas-tunas kecil yang bisa tumbuh sekalipun badai paling menghancurkan pernah menghantam. Di luar sana masih banyak tunas-tunas kecil yang akan tumbuh menjadi raksasa yang kokoh. Tugas kita berikutnya adalah menjaga agar si tunas berkembang dengan sempurna. Tidak mudah memang, tetapi juga tidak mustahil. Tidak ada yang lebih mudah dari berpikir dan berkomentar buruk tentang suatu keadaan, tapi memandang dan berpikir optimis membuat keadaan di hadapan kita menjadi lebih baik.*

*Contoh tempat kita belajar dan bercermin bisa datang dari mana dan dari siapa saja. Beberapa orang mendapatkannya dengan Cuma-Cuma dan sekarang saya mendapatkan kesempatan ini dari sang pemimpin di kantor ini. Dialah sang pemberi contoh.*

*Ballpoint bergerak cepat di atas lembaran kertas membentuk sebuah tanda tangan. Lalu beliau menyerahkan lembaran kertas-kertas itu seraya tersenyum dan mengucapkan terima kasih.*

*Masih dengan sisa kegugupan, saya menerimanya dan segera beranjak keluar meninggalkan ruangan. Sambil berjalan saya bergumam, sebuah tanda yang membuktikan bahwa kekhawatiran terbesar telah terpatahkan, “Reformasi masih ada di DJP.”*

**Setelah saya membaca wacana di atas, nilai Pancasila yang muncul sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara Republik Indonesia adalah**

**…………………………………………………………………………………………………………………**

**………………………………………………………………………………………………………………….**

**………………………………………………………………………………………………………………….**

**………………………………………………………………………………………………………………….**

**Berdasarkan analisis yang saya buat, jika skor berada pada rentang 1-100, maka nilai saya adalah**

**DAFTAR PUSTAKA**

Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. (2008). *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta. FH-UII Press.

Bakry, Noor Ms. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Busrizalti, H. M.(2013). *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta :

Total Media.

Busroh, Abu Daud. )2009). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Erwin, Muhammad. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bandung : Refika Aditama.

Gaffar, Affan. (2004). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gadjong, Agussalim Andi. (2007). *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Kansil, C. S. T. Dan Christine S. T. Kansil. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*.

Jakarta: Rineka Cipta,

Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. (2001). *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita. Kosim, H.E. (2000). *Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik*

*Indonesia*. Bandung: Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA.

Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. (1993). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*.

Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Lemhanas.(1997). Wawasan Nusantara. Jakarta: PT Balai Pustaka.

Marbun, B.N. (2010). *Otonomi Daerah 1945 – 2010*; Proses dan Realita. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

MPR RI.(1998). *Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. [Online]. Tersedia: [http://www.dpr.go.id.](http://www.dpr.go.id/) Html [12 September 2015].

.(2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.

(2002) *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: [http://www.dpr.go.id.](http://www.dpr.go.id/) Html [12 September 2015].

. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. [Online]. Tersedia: [http://www.dpr.go.id.](http://www.dpr.go.id/) Html [12 September 2015].

.(2004) *Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. [Online]. Tersedia: [http://www.dpr.go.id.](http://www.dpr.go.id/) Html [12 September 2015].

.(2006). *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.* [Online]. Tersedia: [http://www.dpr.go.id.](http://www.dpr.go.id/) Html [12 September 2015].

.(2008). *Undang-Undang RI 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara* . [Online].

Tersedia: [http://www.dpr.go.id.](http://www.dpr.go.id/) Html [12 September 2015].

.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. [Online]. Tersedia: [http://www.dpr.go.id.](http://www.dpr.go.id/) Html [12 September 2015].

.(2009).*Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. [Online]. Tersedia: [http://www.dpr.go.id.](http://www.dpr.go.id/) Html [12 September 2015].

.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. [Online]. Tersedia: [http://www.dpr.go.id.](http://www.dpr.go.id/) Html [12 September 2015].

.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. [Online]. Tersedia: [http://www.dpr.go.id.](http://www.dpr.go.id/) Html [12 September 2015].

.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. [Online]. Tersedia: http://www.dpr. go.id. Html [12 September 2015].

.(2012). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

.(2012) . *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

(2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

.(2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: http://www.dpr. go.id. Html [12 September 2015].

.(2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: http://www.dpr. go.id. Html [12 September 2015].

.(2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara*.[Online]. Tersedia: [http://www.dpr.go.id.](http://www.dpr.go.id/) Html [12 September 2015].

Nuryadi, Heri M.S. Faridy, (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan:Wawasan Kebangsaan*, Jakarta, BSNP-BSE.

Pasha, Musthafa Kamal. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Yogyakartaa: Citra Karsa mandiri.

Rahardiansyah, Trubus. (2012). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Riyanto, Astim. (2006). *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya*.Bandung: Yapemdo Santoso, H.M. Agus. (2013). *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi.(2001). *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press. Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2006). *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium

Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.